

### **\*Mimpi Indah Parlemen Modern\***

*\_Oleh: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran\_*

DPR RI terlihat serius menindaklanjuti deklarasi *\_Open Parlemen\_* di Roma tahun 2012, hal ini dikonfirmasi dengan hadirnya delegasi DPR RI dalam Konferensi Tingkat Tinggi *\_Open Government Partnership\_* (KTT OGP) pada Juli 2018 di Tbilisi, Georgia.

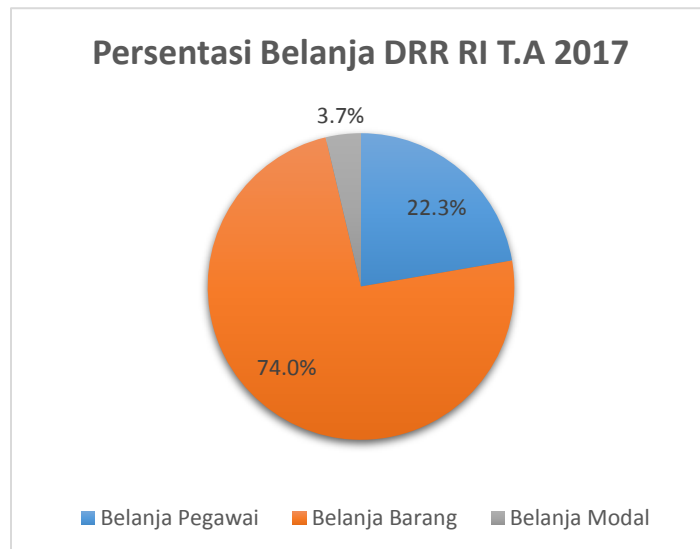
Hadirnya DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon menumbuhkan harapan publik bahwa ke depan lembaga yang merupakan salah satu dari pilar demokrasi ini akan mendorong semangat dan praktik keterbukaan.

Sejalan dengan itu, pada tahun 2015 pimpinan DPR RI berstatement akan menjadikan DPR sebagai parlemen yang modern. Jika dikaitkan dengan *\_Open Parlemen\_* pada 2012 maka proyeksi ke depan DPR akan menjadi lembaga yang memiliki kultur transparan dan menggunakan teknologi komunikasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi, sejalan dengan semangat UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### **\*Bangun dari Tidur\***

Secara keseluruhan, keterbukaan informasi DPR RI sudah menunjukkan adanya perubahan, hanya saja hal tersebut belum menyentuh akuntabilitas dan partisipasi publik.

Sebagai contoh, pada tahun anggaran 2017 realisasi belanja barang DPR RI mencapai Rp 3 triliun, di mana 17 persennya atau Rp 502 miliar digunakan untuk perjalanan dinas. Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPR menggunakan sistem *\_lumpsum\_* sesuai dengan PP no. 61 tahun 1990, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan sistem *\_at cost\_* sesuai dengan PMK no. 113/PMK.05/2012.



Jika kita kritisi, pertanggungjawaban dengan sistem *\_lumpsum\_* ini sangat riskan dijadikan bancakan. Alih-alih memudahkan pelaporan, justru yang terjadi adalah inefisiensi belanja. Sedangkan pertanggungjawaban secara *\_at cost\_* ditemukan masalah keterlambatan laporan yang berpotensi terjadinya perjalanan dinas ganda (Audit BPK 2018).

Contoh di atas menunjukkan komitmen akuntabilitas masih belum terlihat. Diharapkan efek dari adanya komitmen *\_Open Parlemen\_* dalam mendorong parlemen modern tidak hanya bicara

pada keindahan publikasi, tetapi juga adanya peningkatan akuntabilitas dan partisipasi publik.

### **\*Pileg sebagai Momentum Modernisasi\***

Pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 harapannya bukan hanya dijadikan sebagai serimoni semata, melainkan juga dijadikan sebagai momentum untuk melakukan perubahan dengan tidak memilih calon legislatif yang tidak jelas dan tidak memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi. Sudah sepatutnya lembaga legislatif ke depan diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan modern.

CP:

Misbah (Sekjen Fitra) 0822-1171-3249

Gurnadi (Divisi Advokasi) 0856-7174-713